

Vote Buying dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Studi Kasus Pilkada Surabaya dan Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2010

Ali Sahab

Departemen Politik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

This study evaluated the amount of money politics is still in every election in Indonesia, including local election in some areas. On one side are still assessing the candidate's money is an efective tool to vote buying, on the other side people still base their choice based on economic rationality. Some poeple still vote for candidates who provide material benefits rather than program or issue. Respondents in rural areas receive the vote buyig is greater than in urban areas. The level of vote buying in rural areas double than in urban areas.

Keywords: *money politics, local elections, candidates, vote buying,*

Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia pada masa sekarang sudah mencapai kemajuan yang signifikan. Awalnya demokrasi di Indonesia demokrasi representasi, dimana yang memilih Anggota DPR/DPRD masih dipilih oleh Partai Politik sedangkan Presiden, Kepala Daerah dipilih oleh DPR/DPRD. Sejak gelombang reformasi perubahan ke arah pemilihan langsung mulai terjadi. Diawali dengan pemilihan anggota DPR/DPRD, dan diikuti oleh pemilihan kepala daerah dan presiden langsung. Sebagai payung hukumnya pemerintah mengeluarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005.

Adanya pemilihan langsung ini membuat para kandidat berlomba-lomba untuk memenangkan pilihan. Para kandidat tidak jarang akan melakukan segala cara untuk bisa bersaing dengan kandidat lainnya. Tidak jarang kandidat melakukan *money politic* untuk membeli suara. Pembelian suara juga tidak hanya berupa uang, namun bisa juga berupa sembako, mukenah dan bahan

bangunan seperti semen, batako, aspal dan lain-lain.

Fenomena pembelian suara atau *vote buying* kebanyakan terjadi di negara berkembang dimana masyarakat dalam memilih calonnya masih didasarkan pada rasionalitas ekonomi. Di Argentina yang menjadi sasaran *vote buying* yaitu (1) konstituen partai yang tidak mendukung/masih ragu-ragu terhadap calon yang diusung partainya dan bisa pindah ke kandidat lainnya atau *swing voters* (2) pemilih yang cuek/ acuh atau *indifferent voters*. *Vote buying* di Argentina bisa dengan uang atau berupa barang seperti makanan, pakaian, bahan bangunan, kasur, bahkan minuman beralkohol. Di Argentina selain *vote buying*, ada juga *turnout buying* yang hanya mengajak kader partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan. *Tutnout buying* ini untuk kader partai politik yang sudah mempunyai pilihan sesuai dengan pilihan partainya namun untuk hadir dalam pemilihan masih ada keengganan.

Di Nigeria money politik dalam pemilu juga terjadi. Pembelian suara dilakukan untuk memenangkan pemilu. *Vote Buying* dengan memanfaatkan patron atau tokoh masyarakat untuk membeli suara pemilih. Uang yang digunakan Partai Politik untuk money politik berasal dari donatur dari pengusaha yang di Nigeria biasa disebut

sebagai Godfathers. Money politic di Negeria juga disertai dengan intimidasi dari partai politik.

Money politic di Indonesia juga membuat banyak kalangan khawatir akan keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Penyebab maraknya *money politic* di Indonesia yaitu *pertama*, masyarakat Indonesia memang sebagian besar masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi, memilih partai politik atau kandidat yang memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok. Masih jarang masyarakat Indonesia yang memilih partai politik atau kandidat yang memang benar-benar didasarkan pada *track record* atau program yang ditawarkan partai politik atau kandidat. *Kedua*, tidak ada tindakan yang tegas dari aparat kepolisian atau KPU/KPUD sebagai penyelenggara pemilu. Banyak peserta pemilu yang dilaporkan melakukan *money politic* namun tidak ada tindakan nyata. Justru para pelakunya yang mendapatkan hukuman. Apalagi kalau salah satu kandidat merupakan *incumbent*, penyelenggara pemilu mengalami kesulitan dalam menindak.

Fenomena *money politic* dan sampai pada tingkat *vote buying* juga terjadi di Pilkada Surabaya dan Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat ini merupakan salah satu faktor yang dilihat partai politik atau kandidat sebagai celah untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan *vote buying*. Pemilih yang diberi uang oleh kandidat tidak semuanya serta merta langsung memilih calon tersebut. Apakah hal ini menunjukkan pemilih yang irasional atau justru pemilih yang rasional. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui *vote buying* dengan membandingkan fenomena di Pilkada Surabaya dan Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua daerah yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar yang sama-sama melakukan pilkada pada tahun 2010 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk melakukan generalisasi. Populasi dalam penelitian ini masyarakat di dua tempat, Kota Surabaya

dan Kabupaten Blitar yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2010. Sampel yang diambil menggunakan metode *Stratified Random Sampling*. Sampel diambil dari kerangka sampel dengan penarikan lebih dari dua kali pentahapan penarikan sampel dan dilakukan secara proporsional. Sampel dalam penelitian ini baik di Kota Surabaya maupun di Kabupaten Blitar masing-masing sebanyak 384 responden.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung. Instrumen untuk mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan kuesioner. Data yang telah terkumpul dilakukan *cleaning*, hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan. Setelah itu dilakukan coding (penandaan) serta entry data sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga mempermudah untuk analisis. Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS 17.

Hasil Penelitian Pilkada di Kota Surabaya

Penelitian ini juga menganalisa variabel *money politics* dengan variabel karakteristik pemilih seperti suku, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, penghasilan, organisasi sosial agama, dan partai politik dengan menggunakan tabel silang (*crosstabulation*). Hal ini berfungsi untuk mengetahui distribusi *money politics* disetiap variabel karakteristik pemilih.

Money Politics yang bertujuan untuk membeli suara pemilih (*vote buying*) dalam pemilihan-pemilihan di Indonesia masih sering terjadi. Hal ini seperti simbiosis mutualisme. Parpol maupu kandidat akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh suara mayoritas, dan sebagian pemilih ada yang menilai bahwa pemilihan tidak akan memberikan perubahan yang signifikan. Masyarakat tidak merasakan langsung pembangunan. Citra elit politik yang cenderung tidak memperhatikan konstituennya setelah menang membuat masyarakat berfikir rasional. Rasionalitas ekonomi yang akhirnya menjadi tujuan pemilih yaitu dengan menerima kandodat

yang memberi uang. Bahkan ada pemilih yang menerima semua uang dari pemberian kandidat atau parpol namun pilihannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Maximazing benefit dan *minimizing cost* yang menjadi pemilih. Pemilih akan memilih kandidat yang memberi uang atau keuntungan lainnya seperti sembako, atau bantuan lainnya. Pemilih rasional ekonomi tidak akan memilih kandidat yang tidak memberikan keuntungan bagi pemilih.

Money politics dan Suku. Pilkada Surabaya mayoritas yang banyak menerima dan memilih calon atau kandidat adalah Suku Jawa yang mencapai 58,3 %. Namun dari keseluruhan Suku Jawa yang mau memilih ketika diberi uang hanya 4,1 %. Mayoritas Suku Jawa menerima uang yang diberikan kandidat namun pilihannya masih belum tahu yaitu sebesar 57,5 %. Pemilih dari Suku Madura justru lebih banyak yang menerima uang kandidat dan mau memilih kandidat yang memberi uang yaitu sebesar 25 %, lima kali lipat pemilih dari Suku Jawa.

Money Politics dan Umur. Mayoritas pemilih banyak yang menerima uang tapi pilihannya belum tahu yaitu sebesar 52,9 % pemilih. Sedangkan yang menerima uang dan memilih calon tersebut sebesar 6,3 %. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir 60 % pemilih ketika diberi uang oleh parpol atau kandidat menerima uang tersebut. Pemilih yang menerima uang dari kandidat dan mau memilih mayoritas berumur 40-49 tahun yaitu sebesar 33,3 %. Sedangkan pemilih yang menerima uang namun belum tahu pilihannya yang berusia 40-49 tahun sebesar 33,5 %.

Money Politics dan Jenis Kelamin. Mayoritas pemilih yang menerima uang dan memilih kandidat yang memberi adalah laki-laki yaitu sebesar 54,2 %. Sedangkan pemilih yang menerima uang tapi belum tahu pilihannya sebesar 52,3 %. Mayoritas memang yang sering menerima *money politics* para pemilih laki-laki yang cenderung berfikir rasional, "siapa memberikan apa". Karakteristik pemilih laki-laki pun cenderung mudah berubah atau tidak loyal terhadap kandidat walaupun sudah menerima uang.

Money Politics dan Pendidikan. Mayoritas pemilih yang memilih calon yang memberi uang dari latar belakang pendidikan (SD) yaitu sebesar 41,7 %, SMP 25 %, Tidak

sekolah dan SMA sebesar 16,7 %. Sedangkan pemilih yang menerima uang namun belum tahu pilihannya terbanyak dari latar belakang SMA yaitu sebesar 42,9 %, 28,1 % berpendidikan SD, dan SMP sebanyak 21,2 %. Ini menunjukkan mayoritas pemilih yang berpendidikan SD memilih calon yang memberi uang namun untuk pemilih dari latar belakang pendidikan SMA lebih penuh pertimbangan lagi, walaupun sudah menerima uang namun untuk pemilih masih belum menentukan.

Money Politics dan Agama. menunjukkan bahwa mayoritas responden beragama Islam. Pemilih yang memilih kandidat yang menerima uang mayoritas beragama Islam sebesar 100 %, sedangkan pemilih yang menerima uang namun pilihan masih belum tahu juga mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 97 %.

Money politics dan Pekerjaan. Pekerjaan yang paling banyak menerima uang dan memilih kandidat yang memberi uang adalah ibu rumah tangga yaitu sebesar 37,5 % sedangkan yang menerima uang namun pilihan belum tahu mayoritas dari sektor informal sebesar 26,1 %, dan 25,6 % berlatar belakang ibu rumah tangga.

Money politics dan Penghasilan. Latar belakang pemilih yang menerima uang dari latar belakang penghasilan. Kalau dilihat dari penghasilannya, pemilih yang memilih kandidat jika diberi uang adalah pemilih yang berpenghasilan menengah yaitu antara Rp.500.000- Rp.1.000.000. Untuk pemilih yang menerima uang dan memilih kandidat sebesar 37,5 %. Sedangkan pemilih yang menerima uang dari kandidat namun masih belum tahu pilihannya sebesar 67,3 %.

Money Politics dan Ormas. bahwa mayoritas pemilih yang menerima uang dan memilih kandidat organisasi sosial keagamanya adalah NU yaitu sebesar 87,5 % dan 12,5 % pemilih yang tidak aktif dalam organisasi sosial keagamaan. Hal yang sama juga terjadi untuk pemilih yang menerima uang namun belum tahu pilihannya. Mayoritas warga NU yaitu sebesar 53,1 % dan pemilih yang tidak berafiliasi pada organisasi sosial keagamaan sebesar 41,7 %.

Money Politics dan Parpol. Pemilih yang memilih karena uang mayoritas berasal dari konstituen PKB yaitu sebesar 45,8 %, terbanyak kedua berasal dari pemilih PDI Perjuangan yaitu sebesar 20,8 %. Sedangkan untuk pemilih yang menerima uang dari kandidat namun masih belum menentukan pilihannya terbanyak berasal dari pemilih PD yaitu sebesar 42,9 %, sedangkan terbanyak kedua berasal dari pemilih PDI Perjuangan yaitu sebesar 34 %. Hal ini mengindikasikan ada tiga konstituen partai politik yang menerima uang dari kandidat yaitu PKB, PDI Perjuangan dan PD.

Pilkada di Kabupaten Blitar

Money Politics dan Suku. Pemilih pada pilkada di Kabupaten Blitar mayoritas berasal dari Suku Jawa. Homogenitas di Kabupaten Blitar sangat terlihat, hal ini bisa dilihat dari mayoritas pemilih yang memilih atas dasar uang dan pemilih yang menerima uang dari kandidat namun belum tahun pilihannya berasal dari Jawa yaitu sebesar 100 % dan 99,5 %. Sedangkan di Surabaya penduduknya sangat heterogen.

Money Politics dan Umur. Kategori umur yang menerima *money politics*. Pemilih yang memilih berdasarkan uang yang diterimanya yaitu sebesar 36,2 % berumur 40-49 %, sedangkan pemilih yang sudah menerima uang dari kandidat namun belum menentukan pilihannya mayoritas berumur > 50 tahun yaitu sebesar 33,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih yang menerima uang mayoritas berasal dari pemilih yang terkatégorikan sebagai pemilih yang matang. Ini menunjukkan bahwa pemilih yang matang lebih berfikir rasionalis dan kecenderungannya ketika kandidat tidak menepati janji-janji waktu kampanye sehingga lebih banyak pemilih yang berfikir rasional.

Money Politics dan Jenis Kelamin. Jenis kelamin yang paling banyak memilih karena uang adalah laki-laki yaitu sebesar 56,9 %, sedangkan perempuannya hanya mencapai 43,1 %. Untuk pemilih yang menerima uang dari kandidat namun masih belum menentukan pilihannya mayoritas juga laki-laki yaitu mencapai 58,5 %, sedangkan untuk pemilih perempuan hanya mencapai 41,5 %.

Money Politics dan Pendidik-an.

Pemilih yang menerima uang dan pasti memilih calon yang memberi uang mayoritas berlatar belakang pendidikan SD yaitu sebesar 48,3 %, sedangkan pemilih yang sudah menerima uang pemberian kandidat namun belum menentukan pilihan mayoritas juga berpendidikan SD yaitu sebesar 46,3 %. Hal ini menunjukkan latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi seseorang menerima *money politics* atau tidak.

Money Politics dan Agama.

Mayoritas pemilih yang memilih karena uang adalah beragama Islam yaitu sebesar 96,6 %. Hal yang sama pada pemilih yang menerima uang namun belum menentukan pilihannya yaitu sebesar 99,5%. Mayoritas pemilih memang beragama Islam.

Money Politics dan Pekerjaan.

Pekerjaan yang paling banyak menerima uang pada saat pilkada adalah petani. Sebanyak 44,8 % petani yang memilih kandidat karena uang, sedangkan petani yang menerima uang dari kandidat namun belum mempunyai pilihan sebanyak 38,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di Pilkada Kabupaten Blitar yang berlatar belakang petani yang sangat rentan menerima *money politik*. Petani ini selain pemilik tanah juga para buruh tani yang hanya mengerjakan kegiatan cocok tanam untuk pemilih tanah.

Money Politics dan Penghasil-an.

Tabel 36 menggambarkan hubungan antara *money politics* dengan penghasilan. Pemilih berpenghasilan Rp. 500.000- Rp. 1.000.000 merupakan mayoritas pemilih yang menerima *money politics*. Sebanyak 39,7 % pemilih yang memilih berdasarkan uang yang diterimanya dan sebanyak 41,5 % pemilih berpenghasilan Rp. 500.000- Rp. 1.000.000 yang menerima uang dari kandidat namun masih belum mempunyai pilihan.

Money politics dan Ormas.

Karakteristik masyarakat Kabupaten Blitar memang masyarakatnya mayoritas aktif atau berafiliasi pada organisasi keagamaan NU. Pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan keuntungan material sebanyak 67,2 % dari warga NU. Hal ini juga bisa dilihat pemilih yang sudah menerima uang dari kandidat namun masih belum mempunyai pilihan mencapai 62,8 %.

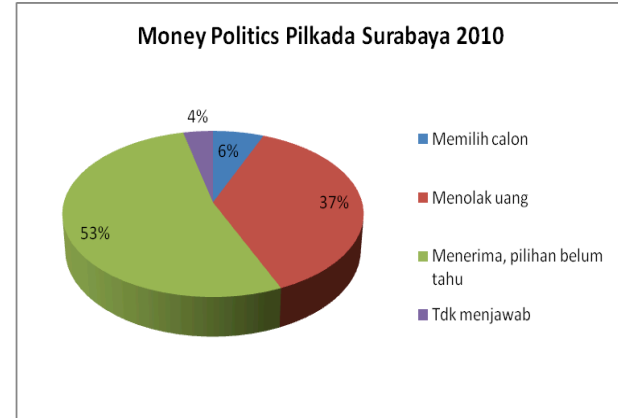
Money politics dan Parpol. Pemilih di Pilkada Kabupaten Blitar mayoritas pemilih yang menerima uang afiliasi politiknya dari PD dan PDI Perjuangan. Ini mengindikasikan bahwa dominasi PD dan PDI Perjuangan juga menggambarkan tingkat kelayalan konstituen di dua partpol tersebut dan atas dasar apa kelayalan konstituen masing-masing partai. Pemilih PD yang menentukan pilihan di Pilkada berdasarkan pada keuntungan material (uang) mencapai 43,1 %, sedangkan pemilih PDI Perjuangan hanya mencapai 31 %. Hal tidak jauh berbeda gambaran pemilih yang menerima uang namun belum tahu pilihannya, antara PD dan PDI Perjuangan bedanya sangat tipis. Konstituen PD pada saat menjelang pilkada menerima uang dan belum menentukan pilihannya mencapai 36,7 % sedangkan pemilih PDI Perjuangan mencapai 35,1 %.

Besarnya Pengaruh Uang

Money politik di pilkada Kota Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar sama-sama menunjukkan kuatnya pengaruh uang. Di satu sisi para kandidat akan melakukan segala cara untuk memenangkan pilihan termasuk dengan memberikan uang kepada pemilih. Di sisi lain masyarakat mendasarkan pilihannya atas dasar rasionalitas ekonomi. Hal ini dilatarbelakangi karena kekecewaan masyarakat atas perilaku para politisi yang sering lupa ketika sudah memperoleh jabatan. Akhirnya masyarakat akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dari kandidat (*maximazing benefit minimazing cost*).

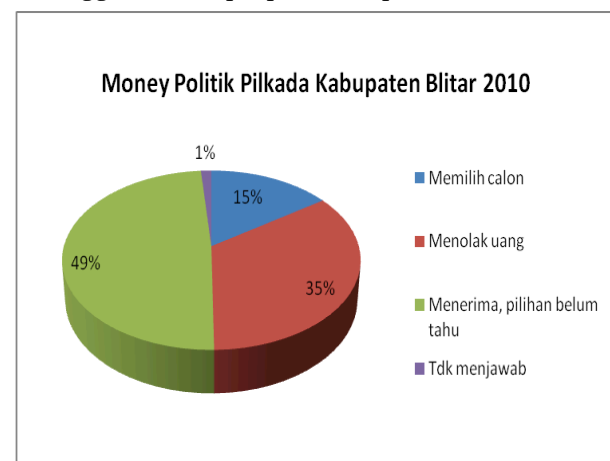
Baik pilkada di Kota Surabaya maupun di Kabupaten Blitar kecenderungannya hampir sama. Mayoritas pemilih yang ikut dalam pilkada hampir 60-65 persen pemilih terlibat money politik atau menerima uang pemberian kandidat. Pemilih di Pilkada Kota Surabaya pemilih yang menerima uang dari kandidat namun masih belum mempunyai pilihan sebesar 53 persen lebih tinggi 4 persen dari Pilkada Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar pemilih yang menerima uang namun belum mempunyai pilihan hanya 49 persen.

Namun untuk pemilih yang memilih kandidat setelah diberi uang di Kabupaten Blitar lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan Pilkada Kota Surabaya. Pemilih di Kota Surabaya hanya 6 persen, sedangkan di



Kabupaten Blitar mencapai 15 persen. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat Kabupaten Blitar yang sebagian besar masyarakat petani (buruh tani). Kondisi status sosial ekonomi beriringan dengan kekecewaan masyarakat terhadap sikap kandidat yang cenderung tidak memperhatikan konstituennya ketika sudah menjabat membuat masyarakat memilih berdasarkan pada rasionalitas ekonomi. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa yang diperolehnya.

Hal inilah yang membuat demokrasi di Indonesia masih mencapai tahap prosedural belum mencapai demokrasi substansial. Secara rutin menyelenggarakan pemilihan umum atau pilkada namun masih diwarnai dengan *money politics*, kecurangan, serta kekerasan antar pendukung. Di lain pihak penyelenggara pemilu seperti KPU/KPUD, Panwaslu masih terkooptasi oleh kandidat sehingga ada keberpihakan pada salah satu



calon terutama incumbent.

Kesimpulan

Pemilihan umum maupun Pilkada di beberapa daerah terutama di daerah yang kondisi sosial ekonominya minus mempengaruhi latarbelakang seseorang dalam memilih. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa yang didapatkannya dari kandidat. Keuntungan material seperti uang, sembako, mukenah yang sering diberikan kandidat pada pemilih terutama *swing voters*. Pemilih yang pilihannya belum pasti dan masih bisa berubah sering menjadi sasaran para kandidat. Pilkada di dua daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar sama-sama memiliki tingkat keterlibatan uang yang sangat tinggi. Hampir 60 persen pemilih menerima uang dari kandidat, ini mengindikasikan bahwa tingkat *money politics* sangat tinggi. Sebagian besar masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi. Keuntungan materi yang dijadikan pertimbangan.

Tingkat *money politics* yang cukup tinggi juga dipengaruhi oleh perilaku elit sendiri. Elit politik yang sudah menduduki posisi kekuasaan kebanyakan tidak memperhatikan konstituennya. Sehingga menjadikan perilaku memilih masyarakat sebagian besar didasarkan pada keuntungan ekonomi. Seperti apa yang dikemukakan oleh Antony Down, *maximazing benefit minimizing cost*. Jadi Menurut Antony Down pemilih memilih kandidat didasarkan pada keuntungan materialnya yang didapat. Meminimalisasi kerugian atau pengeluaran namun memaksimalkan keuntungan yang didapatkannya dari kandidat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Himmelweit pada *Consumer Mode of party choice*, bahwa perilaku memilih merupakan pengambilan keputusan yang bersifat instan, tergantung pada situasi politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan-pengambilan keputusan-keputusan lain.

Pilkada di Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar sama-sama menunjukkan tingginya tingkat keterlibatan uang. Namun antara kedua daerah ini keterlibatan uang sampai pada tingkat *vote buying* di Kabupaten Blitar masih sangat tinggi

dibandingkan dengan Kota Surabaya. Tingkat *vote buying* di Kabupaten Blitar dua kali lipat dibandingkan dengan Kota Surabaya. Mayoritas pemilih memilih kandidat didasarkan pada keuntungan material. Siapa kandidat yang memberi uang maka itu yang dipilih. Rasionalitas yang didasarkan materi ini juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar. Pemilih yang memilih berdasarkan uang mayoritas pekerjaannya petani atau burh tani. Sedangkan di Kota Surabaya mayoritas pemilih yang memilih atas dasar keuntungan materi yang didapatnya dari latarbelakang ibu rumah tangga.

Petani atau buruh tani di Kabupaten Blitar yang penghasilannya pada batas minimal kebutuhan mempengaruhi perilaku memilih mereka. Hal ini logis karena dengan memilih masyarakat meninggalkan pekerjaannya sebagai petani atau buruh tani. Walaupun sehari meninggalkan pekerjaannya, harus ada ganti rugi. Maka dari itu akan memilih kandidat yang mau memberi uang. Sedangkan di Kota Surabaya pemilih yang mendasarkan pilihannya pada pemberian dari kandidat berasal dari latar belakang ibu rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya tuntutan ekonomi di kota besar sehingga banyak ibu rumah tangga yang berpikir sangat dipengaruhi perhitungan untung rugi. Ini merupakan *Rational choice* sesuai dengan latarbelakang pemilih di masing-masing daerah.

Daftar Pustaka

- Asfar, Muhammad (2006) Mendesain Managemen Pilkada.Surabaya:PusDeHAM dan Pustaka Eureka.
- Asfar Muhammad (2004) Presiden Golput.Surabaya:PusDeHAM dan Jawa Pos Press.
- Diamond, Larry.et al (2001) Political Parties and Democracy.USA:The Johns Hopkins University Press.
- Evans, A,J, Jocelyn (2004) Voters & Voting an Introducing.California:SAGE Publication Inc.
- Fuller, A. Wayne (2009) Sampling Statistcs.USA:John Wiley & Sons Inc

- Goodin, Robert E dan Klingenmann D, Hans (ed) (1996) A New Handbook of Political Science. New York: Oxford University Press.
- Ghozali, Imam (2006) Analisis Multivariat Lanjutan dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Groves, M. Robert. et al (2004) Survey Methodology. USA: John Wiley & Sons Inc
- Harison, Lisa (2007) Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haralambos, Michael. et al (2000) Sociology: Themes and Perspective. London: Happer Collins.
- Heywood, Andrew (1997) Politics. London: Macmillan Press.
- Kerlinger, Fred N (2004) Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lau, R. Richard, et. al (2006) How Voters Decide. USA: Cambridge University.
- Mantra, Ida Bagoes (2004) Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, Kacung (2006) Demokratisasi di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung. Surabaya: PusDeHAM dan Pustaka Eureka.
- Nelson, Joan (1987) Political Participation dalam "Understanding Political Development". USA: Little, Brown, and Company.
- Neuman, Lawrence (2000) Sosial Research Methods. A Pearson Education Company.
- Pennings, Paul. et. al. 2006. Doing Research in Political Science. London: SAGE Publication Ltd.
- Pomper, Geral (1987) Voter's Choice: Varieties of American Electoral Behavior. New York: Dod Mead Company.
- Prasetyo, Bambang. et al (2005) Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Singgih (2004) Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Schaffer, C Frederic (2002) What is Vote Buying. London: Cambridge University.
- Singaribun, Masri. et al (1995) Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Surbakti, Ramlan (1992) Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Varma, SP (2003) Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2003) Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies. Washington, DC: The USAID Office of Democracy and Governance Technical Publication Series.

Jurnal

- Nichter, Simon (2008) Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and Secret Ballot dalam American Political Science Review Vol. 102, No.1.